



Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Tasik Bageur di Kota Tasikmalaya

Andi^{1*}, Astri Siti Fatimah², Mira Oktavia³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: andistiatism@gmail.com¹

Abstract. Collaborative governance is a decision-making approach that brings together multiple stakeholders to work toward a shared objective. This study aims to describe the collaborative governance process in poverty alleviation through the Tasik Bageur Program in Tasikmalaya City. Poverty in the city is a multidimensional issue that affects social, economic, and environmental aspects of community life. In response, the Tasikmalaya City Government initiated this program as a collaborative effort involving government institutions, private sector actors, and academic organizations. The program is implemented every Wednesday and is designed to foster cooperation and mutual support in addressing poverty-related needs. Although the program has succeeded in attracting participation from several private and academic actors, this study identifies a major challenge: the number of poor residents remains significantly higher than the number of collaborating partners. This imbalance limits the amount and diversity of assistance provided and reduces the program's overall effectiveness. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observations, interviews, and document analysis. The findings indicate that the collaborative process within the Tasik Bageur Program has not yet reached optimal implementation. Limited understanding and low awareness among private-sector actors hinder broader participation. As a result, the gap between community needs and the available collaborative resources remains substantial.

Keywords: Collaborative Governance; Poverty Alleviation; Stakeholder Collaboration; Tasik Bageur Program; Tasikmalaya City.

Abstrak. Collaborative governance merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses collaborative governance dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Tasik Bageur di Kota Tasikmalaya. Kemiskinan di kota tersebut merupakan persoalan multidimensional yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Sebagai respons, Pemerintah Kota Tasikmalaya meluncurkan program ini sebagai inisiatif kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademik. Program dilaksanakan setiap hari Rabu dengan tujuan mendorong kerja sama dan gotong royong dalam pemenuhan kebutuhan terkait kemiskinan. Meskipun program ini berhasil menarik partisipasi beberapa aktor swasta dan akademisi, penelitian menemukan tantangan utama, yaitu ketidakseimbangan antara tingginya jumlah warga miskin dan terbatasnya jumlah aktor yang berkolaborasi. Ketimpangan tersebut membatasi kuantitas dan keragaman bantuan yang diberikan, sehingga memengaruhi efektivitas program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam Program Tasik Bageur belum terlaksana secara optimal. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aktor swasta menghambat perluasan partisipasi, sehingga kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan sumber daya kolaboratif masih besar.

Kata kunci: Kolaborasi Pemangku Kepentingan; Kota Tasikmalaya; Program Tasik Bageur; Pengentasan Kemiskinan; Tata Kelola Kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi isu penting di daerah perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini, terutama melalui program jaminan sosial terpadu dan inisiatif pengembangan usaha mikro. Program seperti Tasik Bageur menjadi contoh dari tata kelola kolaboratif, di mana pemerintah, sektor swasta, dan institusi akademik bekerja bersama untuk

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Putra & Hasanah, 2023; Hidayat & Nurwanto, 2021). Namun, meskipun upaya ini berhasil mendorong partisipasi masyarakat, tantangan masih ada dalam menjembatani kesenjangan antara tingkat kemiskinan dan sumber daya yang tersedia. Menurut Wahyuni dan Pratama (2022), pengembangan usaha mikro memainkan peran signifikan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi lokal, tetapi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk miskin dan mitra yang berkolaborasi membatasi cakupan bantuan. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 3 Tahun 2022, sangat penting dalam menyusun program pengentasan kemiskinan dan memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan daerah (Aditya & Marsono, 2023). Seperti yang dicatat oleh Sari dan Anggraini (2023), program jaminan sosial terpadu juga terbukti penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan bagi komunitas yang terpinggirkan, yang turut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk mengatasi hambatan partisipasi dari sektor swasta dan memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif (Sukma & Irawan, 2021). Dalam pelaksanaan program yang tertuang pada PERDA No 3 tahun 2022 pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama bersama unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah saja melainkan seluruh pihak termasuk dunia usaha. Berdasarkan PERDA No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, seluruh perusahaan yang berada di Kota Tasikmalaya harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Maka perusahaan atau pihak swasta memiliki keterlibatan dalam mewujudkan kesejahteraan termasuk dalam hal menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Hal tersebut selaras dengan program rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya khususnya oleh Bidang Rehabilitasi Sosial yang bekerja sama dengan pihak swasta, serta masyarakat Kota Tasikmalaya. Program penanggulangan kemiskinan tersebut dinamakan dengan “Tasik Bageur” (Janjian Bersama Berbuat Baik) yaitu suatu program berbasis kolaborasi antara pemerintah Kota Tasikmalaya, pihak swasta, komunitas dan masyarakat yang bersama-sama dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya dengan menyalurkan bantuan langsung turun ke lapangan kepada masyarakat yang sudah

terdata sah layak diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Program Tasik Bageur ini dilaksanakan setiap hari Rabu, seluruh aktor yang terlibat berkumpul langsung di wilayah setempat dengan konsep “janjian” kemudian menelusuri wilayah tempat tinggal masyarakat, bertemu langsung dan memberikan bantuan secara langsung kepada sasaran masyarakat yang sebelumnya telah di survey oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

Aktor yang pernah terlibat dalam Tasik Bageur ini cukup banyak tercatat di tahun 2023 lembaga yang pernah terlibat diantaranya dari pihak pemerintah sendiri yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, Puskesmas dan kelurahan wilayah setempat, dari pihak swasta diantaranya Bank BJB Kota Tasikmalaya, Bank BRI Kota Tasikmalaya, PT Asia Tritunggal Jaya (Plaza Asia) dan BAZNAS Kota Tasikmalaya sedangkan dari pihak masyarakat yang tergabung dalam komunitas atau forum diantaranya PERDI Kota Tasikmalaya, Ikatan Notaris Indonesia, IPPT PENGDA Tasikma Tasikmalaya dan Forum Pembaruan Kebangaan (FPK) Kota Tasikmalaya, STIA YPPT PRIATIM Tasikmalaya dan Radar TV Kota Tasikmalaya. Hal ini menunjukan adanya partisipasi aktif dan kerjasama dari perusahan, pihak swasta dan masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya.

Dapat dilihat bahwa aktor yang pernah terlibat telah mewakili setiap unsur instansi atau lembaga, itu artinya dapat diakatakan bahwa terdapat kontribusi masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Hal ini menggambarkan adanya implementasi dari PERDA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan seharusnya dapat dipertahankan bahkan dikembangkan lebih unggul agar seluruh lapisan masyarakat memahami betul wujud partisipasi nyata dalam mengatasi suatu masalah kesejahteraan sosial.

Namun, dari fenomena yang penulis temukan dan berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan penulis menemukan bahwa pelaksanaan program Tasik Bageur ini ternyata belum optimal, hal ini dikarenakan dari banyaknya aktor yang pernah terlibat hanya 4 aktor saja yang sudah berkomitmen diantaranya Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, BAZNAZ Kota Tasikmalaya, PT Asia Tritunggal Jaya dan Bank BJB Kota Tasikmalaya Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program Tasik Bageur dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah Collaborative governance dalam menurunkan angka kemiskinan adalah yang dilakukan oleh Pimpi Fardianti dan Antik Bintari (2024) penelitiannya membuktikan adanya ketidakefektifan dalam proses kolaborasi seperti, komunikasi antar unsur yang terlibat belum optimal, kepercayaan dan komitmen antar unsur yang terlibat belum terbangun secara merata, belum adanya pemahaman bersama mengenai isu penurunan angka stunting, serta angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya belum turun secara signifikan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses collaborative governance dijalankan dalam Program Tasik Bageur sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dinamika kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penelitian ini bermaksud menemukan faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas program sehingga memberikan gambaran nyata tentang kualitas tata kelola kolaboratif yang berlangsung

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep collaborative governance digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam program Tasik Bageur dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan melalui program Tasik Bageur diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Untuk mengetahui sejauh mana proses kolaborasi dilaksanakan maka penulis menganalisis dengan menggunakan pisau asah dari teori Krik Emerson dan Nabatchi (2015). Adapun operasionalisasi konsep proses collaborative governance dari Krik Emerson dan Nabatchi adalah sebagai berikut :

Keterlibatan berprinsip

Keterlibatan berprinsip merupakan hal yang muncul seiring dengan waktu, dapat melalui dialog tatap muka, rapat umum, hubungan antar organisasi atau setting yang berbeda lainnya. Melalui keterlibatan berprinsip ini, para aktor dengan latar belakang yang berbeda dapat bekerjasama untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu nilai. Emerson dan Nabatchi (2015) mengartikan keterlibatan berprinsip sebagai suatu komunikasi terbuka dan bersifat inklusif yang terjadi seiring berjalannya waktu.

Motivasi Bersama

Proses aktor kolaborasi mengembangkan semangat bersama yang menumbuhkan identifikasi mereka dan pada akhirnya memperkuat dedikasi terhadap collaborative governance. Proses membentuk ikatan sosial dalam hubungan jangka panjang, seperti yang ada dalam CGR. Pada tingkat antar organisasi, kepercayaan dibangun melalui tujuan yang selaras dan konsisten. Proses ini mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menghormati posisi dan kepentingan antar aktor kolaborasi. Proses mengembangkan keyakinan terhadap kemanjuran CGR sebagai perkembangan dinamika kolaborasi mengungkapkan potensi penyatuan dan memanfaatkan sumber daya dan menciptakan kapasitas baru serta komitmen.

Kapasitas untuk melakukan aksi bersama

Kolaborasi terlibat dalam aktivitas bersama untuk meningkatkan kualitas kapasitas kapasitas dalam mencapai tujuan bersama. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama merupakan hasil dari keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mengetahui bagaimana situasi dilapangan secara nyata karena penulis secara langsung melakukan observasi ke tempat penelitian untuk melihat bagaimana proses kolaborasi pada program Tasik bageur berlangsung. Menurut Whitney 1960 (Satibi, 2016, hal. 118) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan situasi atau kondisi apa adanya.

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2022) yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing atau verification. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan kemiskinan tentulah bukan masalah biasa karena dapat mematikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan disuatu daerah akan segera terselsaikan apabila semua pihak ikut terlibat dalam memberantas kemiskinan dalam hal ini permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, artinya semua pihak baik itu pemerintah, swasta, dunia

usaha serta masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk menanggulangi kemiskinan di suatu daerah. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini dibutuhkan usaha bersama yang dinamakan dengan tindakan kolaborasi.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan peran antar *stakeholder*, sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat swasta dan dunia usaha. Proses kolaborasi merupakan inti dari kolaborasi yang menggambarkan secara terperinci mengenai komponen yang membentuk kolaborasi bersifat dinamis yang berputar dalam seluruh komponen dan saling memperngaruhi satu sama lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan salahsatu teori proses kolaborasi dari Emersson dan Nabatchi (2015) dengan dimensi sebagai berikut:

Keterlibatan Berprinsip (*Principled Engagement*)

Keterlibatan berprinsip merupakan hal yang muncul seiring dengan waktu, dapat melalui dialog tatap muka, rapat umum, hubungan antar organisasi atau *setting* yang berbeda lainnya (Emersson & nabatchi, 2015). Melalui keterlibatan berprinsip ini, para aktor dengan latar belakang yang berbeda dapat bekerjasama untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu nilai. Emersson dan Nabatchi (2015) mengartikan keterlibatan berprinsip sebagai suatu komunikasi terbuka dan bersifat inklusif yang terjadi seiring berjalannya waktu melalui empat proses dasar yaitu penemuan, definisi, musyawarah dan penetapan. Melalui proses tersebut maka proses kolaborasi dapat berjalan dan dapat mendorong motivasi dan aksi bersama untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan program kolaborasi Tasik Bageur ini ditemukan bermula dengan ditemukannya data masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya yang perlu segera ditangani karena sudah menjadi masalah multidimensional serta adanya intruksi khusus secara langsung dari PJ Walikota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Sosial Tasikmalaya untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berupa pemberian bantuan secara khusus kepada warga masyarakat yang termasuk ke dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Selanjutnya dari intruksi yang ada Kepala Dinas Sosial mengeksekusi program ini bersama dengan bidang yang terkait yaitu bidang rehabilitasi sosial dan mengajak seluruh *stakeholder* lain untuk bersama-sama ikut berpartisipasi aktif dalam program Tasik Bageur ini dengan sosialisasi melalui *website* Tasik bageur, media sosial (Instagram) serta ajakan langsung kepada para pimpinan *stakeholder* swasta dan dunia usaha.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam teori porses kolaborasi dari Emersson & Nabatchi (2015) tentang penemuan yaitu proses menemukan kepentingan dan tujuan dalam kolaborasi yang dilaksanakan serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Penemuan ini

dianalisis dari mengapa aktor kolaborasi dapat tergabung dalam program Tasik Bageur. Berdasarkan hasil temuan penulis bahwasannya seluruh aktor yang terlibat dapat tergabung dikarenakan ada tujuan dan pemahaman bersama yaitu untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan membangun kesejahteraan melalui penyaluran bantuan serta sebagai upaya implementasi dari setiap instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melaksanakan PERDA Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan serta dunia usaha dan masyarakat swasta yang melaksanakan PERDA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dengan adanya program Tasik Bageur juga memudahkan para dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan data yang kurang valid, namun dengan adanya Tasik Bageur yang dikelola oleh pemimpin kolaborator yaitu Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sangat memfasilitasi data masyarakat yang memang layak diberikan bantuan, sesuai yang diungkapkan oleh informan dari Plaza Asia Kota Tasikmalaya melalui wawancara pada Sabtu, 23 Maret 2024 sebagai berikut :

“...kita berawal dari CSR bahwasannya kita sebagai dunia usaha memang tidak mengetahui secara valid jumlah kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga dengan dasar dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mewadahi program Tasik Bageur kami mendukung penuh meskipun tidak banyak, tetapi kontribusi kami rutin setiap hari Rabu...”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya dengan adanya program Tasik Bageur ini dapat membantu dunia usaha dalam menjalankan program kemanusiaan di instansi masing-masing serta dapat melaksanakan PERDA Nomor 4 Tahun 2015 tentang CSR dengan baik. Oleh karena itu, program kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah saja melainkan bermanfaat untuk seluruh aktor kolaborator yang terlibat.

Selanjutnya untuk mengetahui proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat swasta dalam program Tasik bageur ini peneliti meneliti parameter dari definisi yang berisi tentang batasan atau sasaran dari penerima program Tasik bageur. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi peneliti mengetahui bahwa sasaran penerimanya adalah masyarakat dengan kategori miskin ekstrim diantaranya adalah masyarakat penyandang disabilitas, masyarakat lansia, fakir miskin dan keluarga resiko stunting (KRS). Hal ini didukung dengan data yang diperoleh penulis tentang penerima program Tasik Bageur selama mengikuti penelitian di lapangan pada 3 April 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT LAHR	TANGGAL LAHR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KLUSTER PPKS	KEBUTUHAN	FOTO
1	Johan	Tasikmalaya	25/07/1980	Laki-Laki	Kebon Tengah	3	7	Tuguraja	Ciledug	Keluarga Miskin D3mm	Sembako, sembako untuk anak-anak, tempat tidur, baju, sepatu, ds	
2	Eni Tengri	Brebes	06/10/1974	Perempuan	Jl.Burau II	4	2	Naggarasari	Cipedes	Penghias Kanker	Sembako	
3	Aman Suheman	Tasikmalaya	15/09/1968	Laki-Laki	Bunai II Sindeng Pelet	4	2	Naggarasari	Cipedes	Penghias Kanker	Sembako	
4	MIROH	TASIKMALAYA	03/09/1942	PEREMPUAN	LUUNG SARI	1	17	NAGARASARI	CIPEDES	LANSIA	Sembako	
5	WIVIN	TASIKMALAYA	12/09/1988	PEREMPUAN	LUUNG SARI	3	17	NAGARASARI	CIPEDES	VRSE & Yalm	Sembako	
6	YETIPIPUWATI	TASIKMALAYA	19/07/1982	PEREMPUAN	LUUNG SARI	3	17	NAGARASARI	CIPEDES	VRSE & Yalm	Sembako	
7	SIITA MAESAROH	TASIKMALAYA	09/07/1978	PEREMPUAN	LUUNG SARI	3	17	NAGARASARI	CIPEDES	VRSE & Yalm	Sembako	
8	YAYAH MAFUJAH	TASIKMALAYA	05/07/1983	PEREMPUAN	LUUNG SARI	3	17	NAGARASARI	CIPEDES	LANSIA	Sembako	

Gambar 1. Contoh Proses Jadwal Dan Data Penerima Tasik Bageur.

(Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2024)

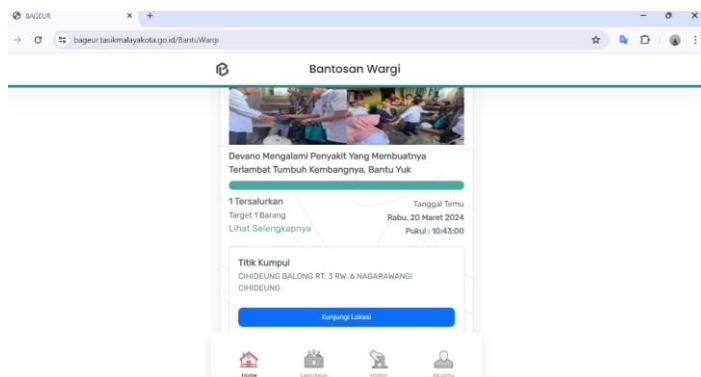
Dari data tersebut tidak semua masyarakat dapat menerima program Tasik Bageur ada batasan atau sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, dunia usaha dan masyarakat swasta. Hal ini sejalan dengan amanat dari pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”

Serta sudah sejalan dengan PERDA Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa salahsatu program penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah dengan pemberian makanan atau kebutuhan dasar. Untuk memastikan kembali data sasaran yang akan menerima bantuan tim verifikator dari Dinas Sosial sebelum pelaksanaan program selalu rutin melaksanakan *survey* kembali atas data yang telah ada untuk dikonfirmasi apakah masyarakat yang bersangkutan layak menerima bantuan atau tidak. Hal ini sesuai dengan proses definisi dari kolaborasi yang disampaikan oleh Emersson & Nabtchi (2015) yang menjelaskan bahwa definisi adalah proses penentuan masalah dalam kolaborasi agar terciptanya diskusi secara terbuka sehingga membentuk kualitas kolaborasi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini program Tasik Baguer sudah melaksanakan prosedur definisi sesuai dengan teori yang digunakan dengan mengolah terlebih dahulu data yang ada untuk kemudian di verifikasi validasi datanya.

Untuk memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi sebelum pelaksanaan program Tasik Baguer Dinas Sosial terlebih dahulu membuat jadwal yang berisi data masyarakat penerima Tasik Bageur beserta waktu dan lokasi untuk kemudian dipublikasikan melalui *website* dan grup *whatsapp*, dengan bergitu seluruh aktor yang terlibat dapat menerima informasi dengan baik serta dapat mempersiapkan kebutuhan atau bantuan yang akan di kontribusikan.

Berikut penulis sajikan contoh jadwal dan data penerima program Tasik Bageur dalam *website* pada bulan April 2024 sebagai berikut :



Gambar 2. contoh tampilan jadwal pada *website* Tasik Baguer.

(Sumber: *Website Tasik Baguer 2024*)

Gambar diatas menunjukan jadwal dan data masyarakat penerima Tasik Baguer dilengkapi dengan identitas dan alamat lengkap beserta kebutuhan yang diperlukan. Dengan begitu seluruh kebutuhan dapat dimaksimalkan oleh seluruh aktor kolaborator hal ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program Tasik Bageur di wilayah setempat yang telah ditentukan.

Selanjutnya adapun tujuan dengan adanya konsep kolaborasi ini dikarenakan adanya keterbatasan pemerintah dalam menanggulangi masyarakat kategori miskin sehingga pemerintah membutuhkan bantuan dari seluruh *stakeholder* untuk bersama memberikan bantuan dan santunan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi secara berkala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah membuat *website* khusus program Tasik Bageur yang di dalamnya berisi data sasaran masyarakat yang hendak menerima bantuan dari program Tasik Bageur serta adanya *whatsapp* grup yang berisi seluruh pimpinan dari berbagai *stakeholder* aktif berperan dalam program Tasik Bageur. Ditambah dengan komunikasi secara langsung di lapangan pada saat pelaksanaan program yang dikhususkan untuk membahas keperluan tambahan para sasaran penerima program Tasik Bageur.

Dengan adanya sarana komunikasi secara online memungkinkan seluruh *stakeholder* atau aktor kolaborator menerima informasi dan laporan pelaksanaan program Tasik Bageur serta dapat melaksanakan diskusi, kritik maupun saran terhadap pelaksanaan program. Menurut Ansell & Gash (2007) diskusi secara langsung berfokus kepada apakah pelaksanaan komunikasi rutin telah dilaksanakan, dimana komunikasi rutin digunakan untuk

mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan antar aktor serta kualitas musyawarah perlu memperhatikan adanya efektivitas komunikasi.

Adapun parameter terakhir dalam keterlibatan berprinsip ini penulis menelaah serta mencermati tentang penetapan yang berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi proses dalam penetapan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu penetapan primer dan penetapan substansif, dalam proses penetapan primer seperti pembuatan jadwal dan penentuan sasaran penerima beserta lokasi penerima bantuan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sedangkan dalam proses penetapan substansif yang menyangkut penyelesaian pada masayarakat penerima bantuan ini dilaksanakan secara langsung melalui komunikasi di lapangan dengan melihat kondisi secara langsung sasaran penerima untuk dianalisa kebutuhan tambahan apa yang memang diperlukan. Hal ini sesuai dengan teori proses kolaborasi dalam parameter penetapan yang disampaikan oleh Emersson & Nabatchi (2015) yang menyampaikan bahwa penetapan merupakan serangkaian tindakan penetapan bersama dengan tujuan berkolaborasi. Penetapan terdiri dari dua jenis yaitu penetapan primer lebih kepada pembuatan keputusan procedural seperti teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan dan kelompok kerja. Sedangkan penetapan substansif lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi kedepan.

Dari informasi yang diperoleh melalui informan yang berhasil di wawancarai di waktu yang berbeda dapat diketahui bahwa sudah tercipta pergerakan prinsip bersama atau keterlibatan berprinsip melalui komunikasi yang rutin dilaksanakan berkala dan bersinergi melalui komunikasi digital *whatsapp* grup, *website* serta pertemuan komunikasi langsung pada saat pelaksanaan program. Hal ini diperkuat juga oleh proses interaktif dari penemuan, pendefinisian, musyawarah dan penetapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengelolaan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengelolaannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Tasik Bageur. Proses kolaborasi membutuhkan adanya kepercayaan dan komitmen yang kuat antar aktor kolaborator. Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari komunikasi dan negosiasi. Namun pada kenyataannya kepercayaan dan komitmen melekat pada bagaimana menjalankan komunikasi itu sendiri. Dapat terbayangkan apabila

suatu tindakan kolaborasi tanpa motivasi bersama kemungkinan kecil tujuan dapat dicapai dengan kecil.

Kepercayaan dalam program Tasik Bageur ini dilihat melalui pengamatan penulis dengan langsung terjun melaksanakan program Tasik Bageur. Sesuai dengan keadaan dilapangan sikap saling percaya ditujukan oleh seluruh *stakeholder* yang sudah terlibat langsung dari berdirinya program sampai sekarang diantaranya Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Dinas P2KB P3A Kota Tasikmalaya, BAZNAZ Kota Tasikmalaya, Plaza Asia Kota Tasikmalaya dan Bank BJB Kota Tasikmalaya. Rasa saling percaya muncul dan terbangun karena adanya pertemuan secara langsung serta adanya komunikasi rutin berkala sebelum dan sesudah program Tasik bageur dilaksanakan. Program Tasik Bageur ini rutin dilaksanakan setiap hari Rabu kecuali tanggal merah sesuai dengan cuti bersama. Adapun media yang digunakan untuk berkomunikasi dilaksanakan melalui dua macam yaitu komunikasi langsung yang tercipta pada saat pertemuan dalam program Tasik Baguer dan komunikasi tidak langsung melalui *whatsapp* grup yang sudah terintegrasi bersama seluruh pimpinan kolaborator dari setiap aktor yang terlibat.

Menurut Emersson & Nabatchi (2015) menjelaskan tentang proses kepercayaan bersama diperlukan usaha terus-menerus dari interaksi untuk mengetahui satu sama lain. Selain itu, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti hubungan saling tergantung, hubungan antar aktor di luar kolaborasi, dan pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor yang lain. Dalam hal ini setelah penulis melewati proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang berjalan dalam program Tasik Bageur sudah berjalan dengan baik.

Setelah tumbuh dan terbangun kepercayaan seiring berjalannya waktu sikap memahami dan menghormati posisi antar aktor yang lain terbangun dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan program tidak ada batasan hubungan antara pemerintah dengan pihak swasta atau dunia usaha, hal ini juga tercipta dikarenakan ada pembagian tugas yang jelas serta tujuan yang sudah dipahami bersama. Dalam program Tasik Baguer terdapat aktor kolaborator yang berasal dari luar pemerintahan namun, meskipun begitu tidak menjadi hambatan dalam keberhasilan program Tasik Baguer. Sampai saat ini yang konsisten berkontribusi dalam program Tasik Bageur diantaranya Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Dinas P2KB P3A, Plaza Asia Kota Tasikmalaya, BAZNAZ Kota Tasikmalaya dan Bank BJB Kota Tasikmalaya. Setelah penulis melaksanakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi proses memahami dan menghargai antar aktor kolaborasi terjalin dengan baik dikarenakan sudah adanya tujuan bersama untuk

menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh salahsatu informan yaitu Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada Selasa, 23 April 2024 sebagai berikut:

“...pada saat pelaksanaan program memang kita sudah memegang tujuan yang sama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan jadi sikap saling memahami dan menghormati ini sudah terjalin dikarenakan tidak ada tujuan yang berbeda ataupun kepentingan lain...”

Melalui hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasannya proses saling pengertian yang dilaksanakan melalui proses saling memahami dan menghargai ini sudah terjalin dengan baik dikarenakan setiap aktor sudah saling memiliki kepercayaan yang tumbuh menjadi proses pemahaman bersama yang baik. Dalam suatu kolaborasi apabila minim sikap saling pengertian dapat mempengaruhi keberlangsungan proses kolaborasi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Emersson & Nabatchi (2015) dalam bukunya yang berjudul *“Collaborative Governance In Regime”* yang menyatakan adanya pemahaman bersama ini dimaksudkan sesame aktor mengerti dan menghargai perbedaan. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk dala kolaborasi.

Selanjutnya dasar hukum dari PERDA nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan dan PERDA nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memperkuat adanya pelaksanaan program ini sehingga komitmen pun semakin terbangun dengan baik dibuktikan dengan adanya konsistensi setiap hari Rabu diadakan program Tasik Bageur dengan konsep janjian berbuat kebaikan. Berikut ini penulis sajikan contoh dokumentasi program Tasik Bageur yang dilaksanakan di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya pada Rabu, 6 Maret 2024 sebagai berikut :



Gambar 3. Foto bersama aktor kolaborator dalam Program Tasik Bageur di

Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2024.

(Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2024)

Gambar diatas menunjukan adanya kebersamaan yang tercipta karena adanya sikap saling menghargai dan memahami peran antar aktor serta terwujudnya kepercayaan dari masing-masing aktor yang terlibat sehingga hubungan kebersamaan dan keharmonisan dapat terjalin dengan baik dari awal sampai akhir program slesai, tidak hanya itu program ini juga menjadi fasilitas bagi seluruh lembaga atau instansi yang terlibat untuk saling berbagi informasi khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Konsep motivasi bersama menurut Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan pemahaman bersama sebagai upaya identifikasi nilai umum melalui adanya kesepakatan tentang definisi permasalahan. Melalui pertemuan bersama terjalin rasa percaya antara aktor satu dengan aktor yang lainnya. Membangun kepercayaan menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya rasa saling percaya dapat memberikan manfaat kolaborasi antar aktor misalnya pemerintah membutuhkan dunia usaha untuk menambah variasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah adanya rasa saling percaya antar aktor maka akan menghasilkan rasa saling memahami dan menghormati (*shared understanding*).

Dari informasi yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan, dapat diketahui bahwa sudah tercipta motivasi bersama mengenai penanggulangan kemiskinan melalui program Tasik bageur ini. Motivasi tercipta dikarenakan adanya konsistensi terhadap pelaksanaan program didukung dengan komunikasi dan penyebaran informasi atau publikasi data dan dokumentasi pelaksanaan program secara berkala. Motivasi bersama juga tercapai melalui unsur lain seperti adanya kepercayaan bersama, saling memahami, legitimasi internal dan komitmen. Seluruh unsur ini sudah terbangun dalam program Tasik Bageur namun unsur komitmen ini masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak semua aktor yang pernah ikut Tasik Bageur kembali ikut serta aktif melaksanakan program Tasik Bageur di jadwal yang berbeda hanya ada lima aktor saja yang dapat dikatakan komitmen penuh melaksanakan program Tasik Bageur. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi agar aktor kolaborator Tasik bageur terus bertambah dan meningkat menjadi lebih banyak sesuai dengan amanat dari PERDA nomor 3 Tahun 2022 bahwasannya masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan.

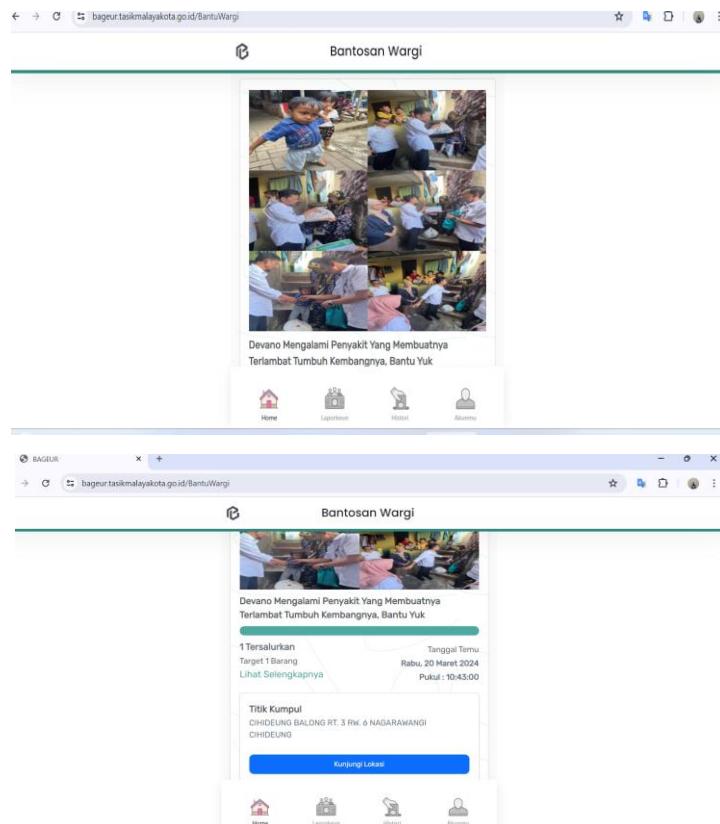
Kapasitas untuk Melakukan Aksi Bersama (*Capacity for Joint Action*)

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bersama yang tidak dapat diselsaikan secara terpisah. Himmelmen (1994) dalam Emersson dan Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi terlibat dalam aktivitas bersama untuk meningkatkan kualitas kapasitas dalam mencapai tujuan bersama. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama merupakan aspek ketiga dari dinamika kolaborasi yang merupakan hasil dari keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama terdiri dari elemen seperti prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.

Dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan melalui program Tasik Bageur ini sudah melibatkan berbagai pihak diluar pemerintahan seperti masyarakat swasta, dunia usaha dan akademisi melalui koordinasi terpusat dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Prosedur dan kesepakatan institusi diformulasikan melalui implementasi dari PERDA nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan dan PERDA nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Tasikmalaya. Pembentukan prosedur dan kesepakatan institusi ini telah terbentuk sesuai dengan yang dikemukakan Emersson dan Nabatchi (2015) yaitu adanya struktur berjerjaring dan *self managed system*.

Ketika suatu kelembagaan kolaboratif sudah terbentuk maka diperlukan konsep kepemimpinan kolaboratif. Menurut teori proses kolaborasi dari Emersson, Nabatchi dan Stephen Balogh (2012) kepemimpinan mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi. Berbagai perannya adalah sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, menginisiasi pertemuan, fasilitator dan mediator, representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, pendistributornya pengetahuan, mendorong pengguna teknologi dalam kolaborasi serta melakukan advokasi pada publik. Berdasarkan dengan penelitian yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan program Tasik bageur terdapat pemimpin yang telah melakukan inisiatif penjadwalan pertemuan bersama dengan mengundang seluruh aktor, kemudian bertemu di lokasi yang sudah ditentukan dengan membawa bantuan dari masing-masing aktor kolaborator untuk siap didistribusikan kepada masyarakat penerima.

Berikut penulis sajikan contoh dokumentasi dari penjadwalan rutin dan penyebaran informasi secara berkala kepada seluruh aktor kolaborator melalui website Tasik Bageur sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Publikasi Informasi Penerima Program Tasik Bageur di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

(Sumber: website Tasik Bageur, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2024)

Gambar diatas merupakan tampilan *website* yang berisi informasi data pelaksanaan program Tasik Bageur yang dapat diakses oleh seluruh aktor kolaborator untuk memperoleh informasi yang akurat dari setiap pelaksanaan Tasik Bageur pada hari Rabu. Dengan adanya *website* ini memudahkan Dinas Sosial untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aktor kolaborator yang lain.

Pada proses kolaborasi, pengetahuan banyak didistribusikan melalui pertemuan bersama. Pertemuan tersebut terdapat penyampaian hasil capaian yang dilakukan oleh para aktor, yang kemudian menjadi bahan diskusi. Proses ini dapat membangun pengetahuan tiap aktor. Setiap aktor yang terlibat dalam program Tasik Bageur ini memiliki karakteristik dan pengetahuan yang berbeda-beda namun, semuanya diberikan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama sehingga rentan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan ataupun pada saat proses komunikasi berlangsung dikarenakan proses pendistribusian informasi dan pengetahuan sudah dilaksanakan melalui komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi yang baik melalui *whatsapp* grup dan *website*.

Dari informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa kapasitas melakukan aksi bersama sudah berjalan melalui kegiatan yang dilakukan bersama secara rutin dan konsisten melalui pelaksanaan program Tasik Bageur yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Namun, dalam hal sumber daya penulis melihat adanya ketimpangan dikarenakan sumber daya tidak dipergunakan sepenuhnya. Seperti pada sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program Tasik Bageur ini yang terlihat baru beberapa aktor saja yang terlibat diantaranya yang sudah berkonsisten penuh adalah Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Dinas P2KB P3A, BAZNAZ Kota Tasikmalaya, Plaza Asia Kota Tasikmalaya dan Bank BJB Kota Tasikmalaya. Dengan begitu terlihat jelas adanya ketimpangan antara jumlah masyarakat miskin dengan aktor kolaborator dalam program Tasik Bageur ini karena akan berdampak pada jumlah kontribusi bantuan yang diberikan. Kapasitas aksi bersama sangat dipengaruhi dari keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama, dimana terdapat kelamahan pada unsur sumber daya dari masing-masing aktor kolaborator.

Penulis melihat apabila dalam salahsatu porsesnya mengalami kecatatan atau ketidakberhasilan maka perlu segera ditinjau kembali bahkan melakukan evaluasi terhadap seluruh aktor yang terlibat, dikarenakan dalam hal ini proses kolaborasi seluruh pihak yang terlibat mengemban tanggung jawab dan tujuan yang sama. Hal ini sesuai dengan tujuan proses kolaborasi yang disampaikan oleh Avianti dan Syahrir (2020) dalam (Waliah dan Mustanir 2022) yang menjelaskan tujuan kolaborasi salahsatunya untuk memecahkan keterbatasan akses sumber daya yang memadai dalam menyelesaikan masalah-masalah publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dimensi proses kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015) pada pelaksanaan program Tasik Bageur dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Proses penemuan, musyawarah, dan perumusan kesepahaman dalam keterlibatan berprinsip telah terlaksana, namun proses penetapan keputusan masih bersifat cepat dan kurang memberi ruang bagi pendalaman keputusan strategis. Motivasi bersama antar aktor kolaborator telah terbangun kuat melalui rutinitas program dan pembagian peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Sementara itu, pada dimensi kapasitas aksi bersama masih terdapat keterbatasan terutama pada aspek sumber daya dan jumlah aktor yang terlibat, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan efektivitas kolaborasi di masa mendatang.

Penelitian ini tidak melakukan pengukuran mendetail terkait jenis dan kontribusi sumber daya (keuangan, SDM, keahlian, sarana/prasarana) yang dialokasikan oleh masing-masing aktor kolaborasi sehingga belum dapat memetakan secara spesifik faktor penyebab keterbatasan kapasitas aksi bersama. Karena itu, disarankan penelitian selanjutnya perlu meneliti kontribusi sumber daya masing-masing aktor secara lebih rinci untuk menemukan model pengelolaan sumber daya yang dapat meningkatkan kapasitas aksi bersama.

DAFTAR REFERENSI

Aditya, R., & Marsono, H. (2023). The role of local regulations in shaping poverty alleviation efforts: Evidence from Tasikmalaya City. *Public Administration and Policy Journal*, 10(3), 98-112.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Fitriani, L., & Maulana, S. (2022). Local development strategies for poverty reduction: A case study from Tasikmalaya City. *Development Policy Review*, 40(6), 122-137.

Hidayat, R., & Nurwanto, S. (2021). Collaborative governance and poverty reduction: A case study in Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Public Administration*, 18(1), 29-42.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan.

Pimpi, F. B. A. (2024). Collaborative governance dalam upaya penurunan angka stunting. *Jurnal Governansi*, 10, 201-212. <https://doi.org/10.30997/jgs.v10i2.14187>

Putra, A. S., & Hasanah, S. (2023). Poverty alleviation programs in Indonesian cities: The role of local government initiatives. *Journal of Public Policy and Administration*, 12(4), 243-257.

Sari, N. A., & Anggraini, M. (2023). Empowering communities through social security programs in small cities. *Journal of Social Welfare and Development*, 15(2), 134-148.

Satibi, I. (2016). *Metode penelitian administrasi publik*. Lemlit Unpas Press.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabet, CV.

Sukma, H., & Irawan, P. (2021). Social assistance programs in Indonesia: Challenges and opportunities in urban settings. *Social Policy and Administration*, 55(3), 257-269.

Wahyuni, D. R., & Pratama, T. (2022). Impact of micro-enterprise development on urban poverty reduction in Java. *Asian Development Review*, 24(2), 106-118.

Waliah, S., Mustanir, & Wismayanti, et al. (2022). *Collaborative governance (dalam perspektif administrasi publik)* (A. Hendrayady, Ed.). CV Media Sains Indonesia.

Yusuf, M., & Alamsyah, A. (2020). Addressing urban poverty: Local government strategies in reducing poverty and inequality. *Journal of Indonesian Urban Studies*, 7(4), 213-227.